JIMMBA

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi

Homepage: <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Nofia Sari¹, Dwi Artati²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa

Email: nofiasari245@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article History:

Received: April 3rd 2021

Accepted: April 7th 2021

Published: April 14th 2021

Keywords:

Firm Size, Audit

Committee, Independent

Commissioner, Tax

Avoidance

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, komite audit, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Rate (CETR)* yaitu beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 yang berjumlah 21 perusahaan dengan jangka waktu 4 tahun sehingga menghasilkan data 84 data. Penelitian menggunakan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pendahuluan

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena dari satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah.

Upaya penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan *property* dan *real estate*. Dilansir dari www.suara.com tahun 2016, yaitu bocornya "*Panama Papers*" yang artinya "Dokumen Panama", dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh jasa panama. Dokumen tersebut berisikan data-data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang-orang terkenal diluar negeri. Dokumen tersebut memuat klien-klien besar yang ada didunia, yang diduga memungkinkan mata uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Ada 2961 nama individu ataupun perusahaan di Indonesia yang terdeteksi di skandal "*The Panama Papers*". Salah satu perusahaan *property* dan *real estate* yang terlibat dalam kasus *Panama Papers* yaitu PT Ciputra Development Tbk (CTRA) yang melakukan

penghindaran pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaannya dengan tujuan untuk menghindari pajak negara. Kekayaan yang berhasil disembunyikan oleh induk PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan anak perusahaannya yaitu PT Juita Ciputra mencapai US\$ 1,48 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun.

Fenomena lain yaitu perusahaan *property* dan *real estate* melakukan penghindari pembayaran pajak dengan cara menunda pembayaran pajak sehingga pajak yang ditunda tersebut dicatat sebagai utang pajak. Berikut ini adalah lima besar perusahaan *property* dan *real estate* yang memiliki utang pajak tertinggi periode 2016-2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Utang Pajak Perusahaan *Property* dan *Real Estate* (Dalam Jutaan Rupiah)

Kode	2016	2017	2018	2019
BKSL	100.908.546.701	151.539.091.992	116.313.870.033	120.184.103.324
BEST	22.169.125.955	33.553.846.184	37.271.995.893	30.518.828.662
BCIP	11.210.696.600	6.900.466.785	6.248.422.398	4.473.580.437
TARA	9.985.674.978	11.245.910.578	13.600.868.790	16.419.543.555
GWSA	3.619.508.681	1.258.976.804	1.554.494.206	1.344.049.639
LPCK	1.898.486.311	205.158.000	346.920.000	452.850.000
FMII	205.772.158	406.497.488	916.046.738	1.003.675.765
ASRI	111.327.899	443.416.670	232.040.420	118.642.395
PWON	77.840.148	98.574.451	87.982.349	78.391.458
MTLA	51.826.805	48.268.722	38.470.000	53.732.000

Sumber: www.idx.co.id, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dari 10 perusahaan *property* dan *real estate* yang memiliki peningkatan utang pajak paling signifikan yaitu PT Foutune Mate Indonesia (FMII) terbukti dari utang pajak dari setiap tahun mengalami peningkatan secara terus-menerus pada empat tahun berturut-turut. Peningkatan utang pajak menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Adanya indikator bahwa perusahaan tersebut menunda pembayaran pajak sehingga pajak yang ditunda tersebut dicatat sebagai utang pajak.

Beberapa fakto yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen. Menurut Mahidin dan Danastri (2017), ukuran perusahaan ialah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan total asset yang terdapat didalam perusahaan *property* dan *real estate*. Pendapat ini disebabkan total aset perusahaan cenderung lebih kukuh dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan jumlah penjualan (Suryani, 2020). Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut akan menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Siregar, 2016).

Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Rani, 2017). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan yang mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

Komisaris independen sebagai dewan komisaris yang bersifat independen dan bertanggung jawab atas pemberian kontribusi di dalam strategi dan pengawasan terhadap performa manajemen perusahaan. Semakin tinggi presentase komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki komisaris independen, oleh karena itu independensi akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah dan begitu pula sebaliknya semakin rendah presentase komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi (Pohan, 2013).

Kajian Teori dan Telaah Literatur

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Rani, 2017). Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang sudah *go public* wajib mematuhi semua aturan dan undang-undang pemerintah, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam penerapan perpajakan, secara normatif setiap warga negara Indonesia yang termasuk sebagai wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007.

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *agent* dengan *principal*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Sarra, 2017). Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Manajer (*agent*) dan investor (*principal*) memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda, tetapi manajer bertindak sesuai keinginan investor (Rani, 2017).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu cara yang dilaksanakan oleh wajib pajak secara umum dari legal karena yang dilakukan untuk menghindari pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah (*grey area*) yang terdapat di undang-undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013). *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan berdasarkan total aset (Adeyani, 2005). Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berskala besar akan mendapat perhatian lebih dari investor, karena memiliki laba yang besar. Perusahaan yang masuk dalam perusahaan besar juga cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, sehingga mudah untuk melakukan pengelolaan pajak (Dermawan dan Sukartha, 2014). Semakin besar aset yang dimiliki juga

menunjukkan semakin meningkat jumlah produktivitasnya, sehingga akan menghasilkan laba yang besar dan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Mahidin dan Danastri, 2017).

Komite Audit

Menurut Diantari dan Ulupui (2016), komite audit merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang berpengaruh secara signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan. Fungsi dari komite audit adalah untuk memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengenalan internal perusahaan serta membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota dimana seorang anggota diantaranya merupakan Komisaris Independen, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* dapat diminimalisasi.

Komisaris Independen

Menurut Diantari dan Ulupui (2016), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang kedudukannya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait. Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Ariawan & Setiawan, 2017).

Model Empiris

Gambar 1. Model Empiris

Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jenis Penelitian

Model Penelitian

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan pada sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Sedangkan Obyek dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2016-2019 sebanyak 62 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, menurut Husein (2010) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mempertimbangkan tertentu. Sampel yang diambil juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan agar sampel digunakan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diperoleh akurat. Kriteria sampel yang digunakan adalah:

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Seluruh perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019	62
Perusahaan yang tidak tercatat berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019	(15)
Perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> tidak konsisten mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap pada periode 2016-2019	(13)
Perusahaan <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang mengalami kerugian selama periode 2016-2019	(13)
Jumlah Perusahaan	21
Total Pengamatan (21 x 4)	84

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2020

Definisi Operasional Variabel

1. *Tax Avoidance*

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproxykan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproxykan dalam rumus total asset sebagai berikut:

$$Size = LN (Total Asset)$$

3. Komite Audit

Variabel komite audit dalam penelitian ini dihitung dalam rumus sebagai berikut:

$$KA = \frac{\text{Jumlah Komite Audit di Luar Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan}}$$

4. Komisaris Independen

Variabel komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dalam rumus sebagai berikut:

$$INDEP = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}}$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Berikut merupakan tabel hasil analisis deskriptif, yaitu:

Tabel 3. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
SQRT_SIZE	84	4.81	5.62	5.1907	.26180
SQRT_KA	84	.71	.82	.8128	.02046
SQRT_INDEP	84	.41	.82	.6427	.07749
SQRT_CETR	84	.28	.70	.5037	.11035
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) dalam penelitian ini diukur dengan *LN* (Total Aset) memiliki nilai minimumnya yaitu sebesar 4,81 dan nilai maksimumnya sebesar 5,62 sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 5,1907 dengan standar deviasi sebesar 0,26180. Komite audit (*KA*) pada data tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 0,71 dan nilai maksimumnya sebesar 0,82, sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,8128 dengan standar deviasi sebesar 0,02046. Komisaris independen (*INDEP*) pada data tersebut menunjukkan bahwa nilai minimumnya sebesar 0,41 dan nilai maksimumnya sebesar 0,82 sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,6427 dengan standar deviasi sebesar 0,07749. *Tax Avoidance* (*CETR*) menunjukkan bahwa nilai minimum *tax avoidance* sebesar 0,28 dan nilai maksimumnya sebesar 0,88, sehingga nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,70 dengan standar deviasi sebesar 0,11035.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat perolehan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) dan nilai *tolerance* dari model regresi untuk masing-masing variabel independen (bebas). Apabila nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinieritas, artinya tidak memiliki hubungan dengan variabel independen lain. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	SQRT_SIZE	.979	1.022
	SQRT_KA	.979	1.021
	SQRT_INDEP	.984	1.016

a. Dependent Variable: SQRT_CETR

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat VIF pada variabel SIZE (X_1) sebesar 1.022, KA (X_2) sebesar 1.021, dan INDEP (X_3) sebesar 1.016. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan masing-masing nilai VIF kurang dari 10. Sedangkan nilai *tolerance* variabel SIZE (X_1) sebesar 0.979, KA (X_2) sebesar 0.979, dan INDEP (X_3) sebesar 0.984. Dari ketiga variabel tersebut menunjukkan masing-masing nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Berdasarkan hasil nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen (bebas) dalam model regresi tersebut.

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan uji statistic *non parametric* Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan dasar pengambilan keputusan Sarjono dan Julianita (2011) sebagai berikut:

1. Nilai *Asymp. Sig.* atau probabilitas lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05) yang artinya data terdistribusi secara normal.
2. Nilai *Asymp. Sig.* atau probabilitas lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) yang artinya data terdistribusi secara tidak normal.

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.10460083
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.064
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel di atas, uji normalitas dengan menggunakan tabel Kolmogorof-Smirnov, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu dilihat dari nilai *Asymp.*

Sig.(2-tailed) sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan cara uji *Durbin Watson*. Sebelum model dikatakan terbebas dari autokorelasi jika $dU < d < 4-Du$ (Ghozali, 2013). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.319 ^a	.101	.068	.10654	1.831

a. Predictors: (Constant), SQRT_INDEP, SQRT_KA, SQRT_SIZE

b. Dependent Variable: SQRT_CETR

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas dapat dilihat *Durbin Watson* (DW) sebesar 1,831 dengan $N = 84$ dan parlemen $k = 3$ maka diperoleh nilai dL (batas bawah) sebesar 1,5723 dan dU (batas atas) sebesar 1,7199 dan $4-dU$ sebesar 2,2801 atau $1,7199 < 1,831 < 2,2801$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada data tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Scatterplot*. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas yang diolah dari uji *Scatterplot*:

Sumber: olah data SPSS 25, 2021

Gambar 2. Scatterplot

Berdasarkan gambar dari *Scatterplot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, Komite audit, serta komisaris independen terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Berikut merupakan tabel hasil uji regresi linier berganda:

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.656	.569		-1.151	.253
SQRT_SIZE	.105	.045	.250	2.330	.022
SQRT_KA	.885	.578	.164	1.532	.130
SQRT_INDEP	-.165	.152	-.116	-1.084	.282

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} sebesar 2,330 lebih besar dari t_{tabel} 1,99006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.
2. Variabel Komite audit (*KA*) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} sebesar 1,532 lebih kecil dari t_{tabel} 1,99006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.
3. Variabel komisaris independen (*INDEP*) secara statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t_{hitung} sebesar -1,084 lebih kecil dari t_{tabel} 1,99006 dengan nilai signifikansi sebesar 0,282 lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2012) uji simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut ini hasil uji berdasarkan nilai F yang diturunkan dari tabel ANOVA (*Analysis of Variance*) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.103	3	.034	3.012	.035 ^b
	Residual	.908	80	.011		
	Total	1.011	83			

a. Dependent Variable: SQRT_CETR

b. Predictors: (Constant), SQRT_INDEP, SQRT_KA, SQRT_SIZE

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan dari tabel hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ (5%) dan $F_{hitung} 3,012 > F_{tabel} 2,76$ yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga, hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, komite audit dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut Ghazali (2016), koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi, yaitu:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.319 ^a	.101	.068	.10654

a. Predictors: (Constant), SQRT_INDEP, SQRT_KA, SQRT_SIZE

b. Dependent Variable: SQRT_CETR

Sumber: Olah Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel hasil pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,068 atau sebesar 6,8%. Hal ini dikatakan sebesar 6,8% karena variabel komite audit dan komisaris independen memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen dan kegiatan operasional perusahaan sehingga belum tentu dapat mempengaruhi ada tidaknya kegiatan penghindaran pajak. Sedangkan 0,932 atau 93,2% sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa t_{hitung} sebesar 2,330 lebih besar dari t_{tabel} 1,99006 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan *property* dan *real estate*, maka perusahaan tersebut akan semakin besar pula upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonomi atas sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sehingga, perusahaan yang besar dapat mengelola aset perusahaan untuk

mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan beban perusahaan tersebut yang dapat menimbulkan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Honggo dan Marlinah, 2019). Namun sebaliknya, semakin kecilnya ukuran perusahaan menimbulkan pengelolaan terhadap aset perusahaan juga semakin sedikit, sehingga peluang untuk melakukan upaya penghindaran pajak juga kecil karena adanya keterbatasan pada beban perusahaan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh agen (manajemen) untuk menekan penghasilan kena pajak perusahaan.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar 1,532 lebih kecil dari *t* tabel 1,99006 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,130 > 0,05$, sehingga H_2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan penunjukan anggota komite audit di perusahaan *property* dan *real estate*, sebagian besar belum berdasarkan atas kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai dari masing-masing anggota komite audit. Sehingga anggota komite audit yang terpilih tidak dapat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan dengan baik. Selain itu, jumlah anggota komite audit pada perusahaan *property* dan *real estate* tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*. Oleh karena itu, kinerja dari komite audit belum efektif dan optimal dalam mengembangkan dan menerapkan proses pengawasan untuk meminimalisir dilakukannya tindakan *tax avoidance* di perusahaan *property* dan *real estate* (Mahidin dan Danastri, 2017).

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t* hitung sebesar -1,084 lebih kecil dari *t* tabel 1,99006 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,282 > 0,05$, sehingga H_3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen dalam perusahaan *property* dan *real estate* banyak atau sedikit jumlah komisaris independen ternyata tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Disisi lain tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan komisaris secara keseluruhan. Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak. Komisaris independen secara pro aktif dapat mendorong pihak manajemen untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga kehadiran komisaris independen ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap pajak yg dilakukan oleh manajemen karena pengawasan tidak dilakukan secara profesional. Selain itu, hal ini juga dapat juga disebabkan mekanisme komisaris independen dalam tata kelola perusahaan yang tidak efektif dalam mengurangi masalah agensi sehingga komisaris independen tidak dapat mengarahkan jajaran manajer yang lain untuk bertindak sesuai kepentingan terbaik pemegang saham (Masrullah *et al*, 2018).

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 21 sampel perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin besar pula upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* dan sebaliknya, kecilnya ukuran perusahaan maka semakin kecil pula peluang untuk melakukan upaya *tax avoidance*.
2. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan jumlah anggota komite audit pada perusahaan *property* dan *real estate* tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*. Sehingga besar kecilnya presentase jumlah komite audit tidak mempengaruhi ada atau tidaknya praktik *tax avoidance* pada *property* dan *real estate*.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya presentase jumlah komisaris independen tidak mempengaruhi ada atau tidaknya praktik *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota dewan komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berdasarkan pada laporan keuangan tahunan perusahaan sektor *property* dan *real estate* periode 2016-2019. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah periode tahun penelitian agar mendapatkan sampel penelitian lebih banyak dan hasil maksimal.
2. Penelitian ini juga hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Komisaris Independen, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance*.
3. Model regresi dalam penelitian ini, ketiga variabel independennya hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu *tax avoidance* sebesar 6,8% dan untuk sisanya 93,2% dijelaskan oleh variabel-variabel dan faktor-faktor lain diluar model penelitian. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap *tax avoidance*.

Implikasi Praktis

1. Bagi Perusahaan

Sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih memperhatikan pajak yang harus dibayarkan, sehingga tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan negara dan dapat menjaga citra perusahaan dengan memfokuskan pada aset yang menggambarkan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi khususnya di perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Para investor diharapkan untuk melakukan pengamatan sebelum berinvestasi terkait dengan kinerja perusahaan yang mengarah pada tata kelola perusahaan dan analisis keuangan perusahaan yang dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi terutama terkait dengan aset perusahaan yang dapat menggambarkan besar atau kecilnya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, karena lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil dengan menggunakan besarnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Maka, implikasi teori ini sejalan dengan *agency theory* yang mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri.

Namun variabel komite audit dan komisaris independen membuktikan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena penunjukan komite audit belum berdasarkan atas kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai dari masing-masing anggota komite audit sehingga anggota komite audit yang terpilih tidak dapat melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan dengan baik sehingga tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*.

Sedangkan komisaris independen dikarenakan memiliki peran melakukan pengawasan terhadap direksi sehingga tidak intervensi dalam pengambilan keputusan pajak yang belum tentu mempengaruhi adanya kegiatan penghindaran pajak. Maka teori yang sejalan dengan implikasi ini teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menyatakan bahwa teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang sudah *go public* wajib mematuhi semua aturan dan undang-undang pemerintah, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Referensi

- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831-1859.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702-732.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM*.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan*. Penerbit Universitas Diponogoro. Semarang.

- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 9-26.
- Husein, U. (2010). *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Indonesia.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Mahidin, I., & Danastri, N. D. (2017). Analisis Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)(Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013). *Media Riset Akuntansi*, 5(2), Hal-40.
- Masrullah, M., Mursalim, M., & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *SIMAK*, 16(02), 142-165.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. 2017. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 6(2), 221-241.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 63-86.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).
- Suryani, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83-98.